



USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PENCEGAHAN KORUPSI

MELALUI PENGOPTIMALAN FUNGSI PARTAI POLITIK

DAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE

Bidang Kegiatan:  
PKM-GAGASAN ILMIAH

Diusulkan oleh:  
Septiana Ika Wardani 3301413059/2013  
Dian Triyani Mahfirotik 3301413013/2013  
Nida Haryati 7211412041/2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
SEMARANG  
2014

### PENGESAHAN PKM-GAGASAN TERTULIS

1. Judul Kegiatan : Pencegahan Korupsi Melalui Pengoptimalan Fungsi Partai Politik Dan Pembatasan Dana Kampanye
2. Bidang Kegiatan : PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
  - a. Nama Lengkap : Septiana Ika Wardani
  - b. NIM : 3301413059
  - c. Jurusan : Pendidikan dan Kewarganegaraan
  - d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Negeri Semarang
  - e. Alamat Rumah dan No. HP : Dk.Karang Anyar RT.02 RW.08 Ds. Pilang, Kec. Randublatung, Kab. Blora , dan HP. 085641703677
  - f. Alamat e-mail : septiana\_ikawardani@yahoo.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 orang
5. Dosen Pendamping
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Noorochmat Isdaryanto,S.S.,M.Si
  - b. NIDN : 0004127105
  - c. Alamat Rumah dan No. Telepon/HP : Ngawen RT.003,rw.007 Ngawen,Klaten,Jawa Tengah dan,085643364611

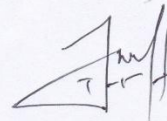
Semarang, Maret 2014  
Menyetujui ,

Ketua Jurusan  
Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.  
NIP. 19610127 1986011001

Ketua



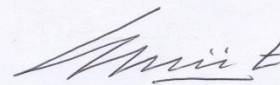
Septiana Ika Wardani  
NIM. 3301413059

Pembantu Rektor  
Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.  
NIP. 19711204201012100

Dosen Pendamping



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si  
NIP. 196205081988031002

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puja dan Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Pencegahan Korupsi Melalui Pengoptimalan Fungsi Partai Politik Dan Pembatasan Dana Kampanye”. Karya tulis ini disusun dalam rangka mengikuti program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis (PKM-GT) yang diadakan oleh Universitas Negeri Semarang. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sumbangsih pemikiran terhadap perbaikan konsep pembangunan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan.

Dalam penulisan karya tulis ini tidak terlepas dari peranan pihak-pihak yang membantu proses pembuatan karya tulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si., selaku Dosen pembimbing
2. Kedua orang tua kami tercinta, atas segala do'a, pengorbanan serta kasih sayangnya yang selalu menyertai langkah saya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangannya. Namun, besar harapan kami agar tulisan ini dapat diterima dan nantinya dapat dipakai oleh semua pihak. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, Maret 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                        | i        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                    | ii       |
| KATA PENGANTAR .....                                                                       | iii      |
| DAFTAR ISI .....                                                                           | iv       |
| RINGKASAN .....                                                                            | 1        |
| PENDAHULUAN .....                                                                          | 2        |
| Latar Belakang .....                                                                       | 2        |
| Tujuan Penulisan .....                                                                     | 3        |
| Manfaat Penulisan .....                                                                    | 3        |
| GAGASAN .....                                                                              | 4        |
| Kondisi kekinian pencetus gagasan... ..                                                    | 4        |
| Solusi yang pernah ditawarkan.....                                                         | 5        |
| Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat<br>diperbaiki.....                   | 6        |
| Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu<br>Mengimplementasikan gagasan.....        | 7        |
| Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk<br>mengimplementasi-kan gagasan ..... | 7        |
| KESIMPULAN .....                                                                           | 8        |
| <b>Gagasan yang diajukan .....</b>                                                         | <b>8</b> |
| <b>Teknik implementasi yang akan dilakukan .....</b>                                       | <b>9</b> |
| Prediksi yang diperoleh .....                                                              | 10       |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                        | 11       |

PENCEGAHAN KORUPSI  
MELALUI PENGOPTIMALAN FUNGSI PARTAI POLITIK  
DAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE

Septiana Ika Wardani

Dian Triyani Mahfirotik

Nida Haryati

Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Semarang

**RINGKASAN**

Faktor penyebab terjadinya korupsi adalah rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Sebab, hal ini berhubungan dengan pengembalian modal saat kampanye, baik untuk 'money politics' maupun lainnya. Selain itu, budaya memberi upeti (balas jasa) kepada 'sponsor' juga merupakan akar masalah terjadinya korupsi, karena pihak-pihak ini secara tidak tersurat mendapat persenan. Padahal, gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan hidup pejabat masih belum seimbang dengan pengeluaran setiap bulan, apalagi pejabat yang terpilih dengan jalan pintas: money politics. Dengan demikian, korupsi di negeri ini seperti hilang satu tumbuh seribu meskipun kinerja komisi pemberantasan korupsi sudah mati-matian memberantasnya.

Untuk itu, pembatasan dana maksimal untuk kampanye sangat tepat digunakan untuk solusi permasalahan ini, karena dengan adanya pembatasan ini, maka para calon maupun Partai Politik tidak akan mengeluarkan modal kampanye banyak, hal ini juga ditunjang dengan pengoptimalan fungsi Partai Politik, sehingga sangat sedikit kemungkinan untuk mengembalikan modal dengan korupsi.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan penulisan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data skunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik yang ditulis, baik dari buku, makalah, hasil penelitian, ataupun internet.

Analisis data dalam penulisan ini adalah dengan cara bahan yang telah terkumpul kemudian diolah, ditelaah, dan direduksi, lalu dianalisis dengan analisis deskriptif untuk disarikan dalam sebuah karya yang memfokuskan "Pencegahan Korupsi Melalui Pengoptimalan Fungsi Partai Politik dan Pembatasan Dana Kampanye guna menciptakan pemerintah yang bersih."

Kesimpulan dalam karya tulis ini adalah (1) tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini sudah bagus, tapi belum maksimal., (2) Rendahnya pendapatan penyelenggara negara merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi, karena hal ini berhubungan dengan pengembalian modal 'pribadi' saat kampanye, dan (3) Kurangnya Pengoptimalan Fungsi Partai Politik, hal ini ditandai dengan banyaknya penyimpangan Partai Politik merupakan kelengkapan kehidupan bernegara yang sangat penting sekaligus merupakan ciri utama negara demokratis.

Sebagai catatan di “negara-negara baru” partai belum berfungsi secara wajar dan belum sepenuhnya dilaksanakan, misalnya, komunikasi masih berjalan sepihak ( top-down ), sosialisasi terkadang hanya menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan partai bahkan partai melakukan manipulasi nilai-nilai. Rekrutmen dilakukan bukan berdasarkan kemampuan tetapi lebih pada sistem kekeluargaan dan koneksi. Sebagai penengah konflik partai sering bukan mendamaikan, tetapi ikut menambah konflik.

Oleh karena itu, ada beberapa solusi agar tidak terjadi penyimpangan politik. Pertama, pencerdasan publik terhadap masyarakat agar mampu mengambil sikap yang benar terhadap kebijakan, proses pemilihan umum dan kampanye partai politik.

Polanya sebagai berikut: mewajibkan pengoptimalan fungsi partai yaitu, semua partai harus menjalankan semua fungsi partai yang diawasi oleh pengawas independent dan KPK, KPU juga harus membatasi dana kampanye partai , serta jika ada indikasi kecurangan maka KPK dapat langsung menindak lanjuti.

Rekomendasi yang diberikan penulis adalah (1) bagi pemerintah (KPK), tingkatkanlah pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, supaya bangsa ini bisa bersih dari tindakan yang memalukan, yaitu korupsi, (2) Bagi calon pemimpin, janganlah menodai keindahan demokrasi kita dengan menggunakan money politics, karena hal ini akan bisa menjerumuskan pada tindakan korupsi, dan (3) Bagi masyarakat, hati-hatilah dalam memilih calon pemimpin, supaya pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mampu dan siap menjalankan amanah rakyatnya.

## PENDAHULUAN

### 1.Latar belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan.

Diantaradua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, Negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.Mengapa demikian?

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lainsebagainya di luar batas

kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Disisi lain, Korupsi merupakan hal yang paling menarik untuk dijadikan sebagai jalan pintas dalam mengembalikan modal saat pemilu (modal kampanye), biasanya dilakukan oleh para partai yang tanpa mempedulikan fungsi Partai.

Di negeri ini yang namanya korupsi sudah dijadikan sebuah hobi, bahkan sudah menjamur dan membudaya, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini merupakan salah satu indikator degradasi moral para pejabat bangsa ini, sehingga muncul pertanyaan besar: apakah korupsi ini disebabkan pelaksanaan demokrasi yang kurang dewasa bangsa ini yang selalu mengedepankan uang untuk meraih kekuasaan (tahta).

Arya Maheka (2006: 23-24) mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi diantaranya; rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Seharusnya pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, sehingga mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan adanya budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.

Selain itu, budaya memberi upeti (balas jasa) kepada sponsor (pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mensukseskan pemilu juga) merupakan akar masalah terjadinya korupsi, karena pihak-pihak ini secara tidak tersurat mendapat persenan. Padahal, gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan hidup pejabat masih belum seimbang dengan pengeluaran setiap bulan, apalagi pejabat yang terpilih dengan jalan pintas: *money politics*.

Selain itu, isu politik uang ini juga diibaratkan seperti hebohnya' orang yang sedang membuang angin di tengah keramaian. Baunya merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk menunjuk orang yang membuang angin tersebut.

Murray Print (dalam Ubaidillah, dkk, 2000) mengatakan bahwa pembentukan warganegara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewargaan (*civic education*). Civic education, dengan demikian, merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda yang mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai dan keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melewatkan demokrasi, terutama bagi partai-partai yang akan mengikuti pemilu, sehingga fungsi dari partai politik dapat berjalan dengan baik.

Dari gambaran di atas terlihat adanya degradasi moral para pejabat dan partai politik yang berujung pada tindakan korupsi yang digunakan sebagai jalan pintas untuk mengembalikan modal kampanye, dan tidak melaksanakan fungsi partai itu sendiri, sehingga pengoptimalan fungsi partai politik dan pembatasan dana kampanye serta pengoptimalan fungsi partai, sangat berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

#### TUJUAN PENULISAN

1. Gagasan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk memberantas tindakan korupsi.
2. Gagasan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencegah tindakan korupsi.
3. Masyarakat, khususnya lembaga pemerintah, melalui gagasan ini bisa mengetahui pola mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui pengoptimalan fungsi partai politik dan pembatasan dana kampanye.

#### MANFAAT PENULISAN

### 1. Masyarakat

Pengetahuan tentang cara mengoptimalkan pencegahan terhadap tindakan korupsi melalui pengoptimalan fungsi partai politik dan pembatasan dana kampanye, guna menciptakan pemerintah yang bersih. Hal ini jika ditangani secara benar dan tepat, maka alternatif ini bisa mengentaskan kita dari degradasi moral para oknum pejabat kita yang korupsi. Akhirnya, penyelenggara pemerintah kita bisa benar-benar bersih dari tindakan korupsi, sehingga mereka bisa focus dalam menjalankan amanah dari rakyatnya.

### 2. Calon pemimpin

Untuk memperoleh para pemimpin –pemimpin yang bisa membentengi dirinya dari tindakan –tindakan maupun gejala- gejala korupsi yang semakin merajalela, baik rakyat kecil maupun kaum elit yang semuanya mempunyai potensi untuk melakukan tindakan korupsi, maka diharapkan berkat gagasan optimalisasi fungsi partai politik dan pembatasan dana kampanye dapat mencegah tindakan korupsi guna memperoleh pemimpin yang amanah.

### 3. Partai politik

Dapat dijadikan patokan bagi partai politik dalam mengusung program partai politik agar sejalan dengan fungsi partai politik agar dapat sejalan serta pembatasan dana kampanye, dan dapat mencegah segala macam tindakan korupsi.

#### **GAGASAN**

#### **Kondisi kekinian pencetus gagasan**

Di mata publik, partai politik belum menjadi aset, melainkan liabilitas bagi kemajuan bangsa. Berbagai polling menunjukkan, parpol adalah lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling rendah dari masyarakat. Tapi, sebuah negara demokrasi tidak bisa hidup tanpa parpol. Partai malah merupakan elemen paling penting dalam kehidupan demokrasi.

Parpol menentukan maju-mundurnya sebuah negara bangsa. Parpol yang berkualitas akan menjadi katalisator pembangunan di berbagai bidang. Tapi, di Indonesia saat ini, parpol merupakan sumber korupsi. Dengan berbagai “tangannya”, uang negara “dirampok”. Uang negara dikerok dengan berbagai cara untuk menggelembungkan pundi-pundi partai dan memuluskan jalan politik para aktor partai menuju puncak kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sebuah seminar kemarin mengungkapkan keanehan pengucuran dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 300 triliun selama kurun waktu 2007-2010. Dinilai aneh dan patut dicurigai karena dana itu dikucurkan pada tahun terakhir menjelang incumbent mengakhiri masa jabatannya dan bertepatan dengan periode kampanye untuk memasuki periode kedua. BPK menengarai, pengucuran dana pada periode itu sangat rawan penyimpangan. Sejumlah temuan menunjukkan, dana bansos, antara lain digunakan untuk membeli baju kaos calon gubernur dan bupati dari parpol tertentu.

Dana bansos Rp 300 triliun dalam kurun waktu empat tahun atau sekitar Rp 75 triliun per tahun bukan angka kecil. Jika digunakan langsung untuk kesejahteraan rakyat sudah berapa puluh juta rakyat Indonesia yang bisa dientaskan dari kemiskinan. Bila digunakan untuk infrastruktur, sudah berapa pelabuhan, bandara, dan ruas tol yang bisa dibangun. Sangat disayangkan dana sebesar itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik.

Begitu banyak dana publik yang diselewengkan untuk keperluan politik. Selain bansos, dana sejumlah program pemerintah seperti PNPM, BOS, dan jamkesmas juga rawan penyelewengan. Ambisi politik dan minimnya dana parpol mendorong “orang-orangnya” menyabet dana dari berbagai proyek. Ambruknya jembatan gantung di Sungai Mahakam, “golden gate” yang menghubungkan dua wilayah di Kutai Kertanegara, tidak lepas dari faktor mark up untuk mempertebal dana politik.

Berbagai penyelewengan ini terjadi karena parpol tidak mempunyai sumber dana legal yang cukup. Iuran anggota parpol boleh dibilang hampir nol kecuali PKS. Para anggota partai ini masih cukup disiplin memberikan infak. Tapi, untuk membiayai kegiatan parpol yang sangat besar, dana itu tidak cukup. Buktinya, PKS tetap ngotot ikut dalam pemerintahan.

Bantuan pemerintah Rp 108 per pemilih sama sekali tidak berarti. Tahun lalu, total APBN untuk semua partai hanya Rp 9 miliar. Padahal, biaya kampanye legislatif satu partai besar mendekati Rp 1 triliun. Biaya kampanye calon bupati di Jawa sudah di atas Rp 10 miliar. Parpol dan para kadernya akan mencari dana dari berbagai sumber, legal dan ilegal.

Dalam situasi seperti ini, parpol dikuasai oleh orang berduit. Selain ketua partai yang kaya atau memiliki akses pendanaan, bendahara umum mendapat tugas khusus untuk menggelembungkan pundi-pundi partai. Badan Anggaran di DPR RI diisi oleh sejumlah bendahara partai. Setiap parpol berusaha ikut mendudukkan orang-orangnya di pemerintahan karena di sanalah sumber duit. Begitu pula posisi direksi di BUMN.

Hal ini sangat berlawanan dengan fungsi partai politik, yang tidak hanya mementingkan pendanaan partai politik tapi juga harus memikirkan fungsi dibentuknya partai itu sendiri.

### **Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan**

Pemerintah sudah berusaha untuk memberantas korupsi. Salah satu buktinya adalah dengan dibentuknya lembaga yang khusus memberantas korupsi, yaitu Komisi Korupsi (KPK). Prestasi lembaga ini sudah bisa dikatakan bagus.

Hal ini bisa dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa mafia hukum, seperti Artalita Suryani (Ayin). Arbie Haman (2009) menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2008 KPK telah berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 70 kasus di bidang penindakan, dan perkara yang sudah *inkracht* sebanyak 7 perkara. Ironisnya sebagian besar dari terpidana korupsi yang dijabloskan KPK berasal dari DPR. Pada tahun 2009 semester pertama sudah 3,4 triliun uang negara yang diselamatkan KPK.

Marzuki mengatakan, yang penting dicermati dari kinerja KPK adalah profesionalisme KPK dalam melaksanakan tugas. Sejauh ini kinerja KPK di bawah pimpinan Abraham Samad, dinilai Marzuki, cukup baik. Dari sisi keberanian, misalnya, KPK berani membongkar dugaan kasus korupsi yang terjadi di institusi Polri. “Dari sisi keberanian KPK kali ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Selain partai politik yang ingin mengembalikan dana saat kampanye, juga terdapat penyelewengan fungsi partai politik diantaranya, dari keempat fungsi partai politik nampak bahwa partai merupakan kelengkapan kehidupan bernegara yang sangat penting sekaligus merupakan ciri utama negara demokratis. Sebagai catatan di “negara-negara baru” partai belum berfungsi secara wajar dan belum sepenuhnya dilaksanakan, misalnya, komunikasi masih berjalan sepihak ( top-down ), sosialisasi terkadang hanya menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan partai bahkan partai melakukan manipulasi nilai-nilai. Rekrutmen dilakukan bukan berdasarkan kemampuan tetapi lebih pada sistem kekeluargaan dan koneksi. Sebagai penengah konflik partai sering bukan mendamaikan, tetapi ikut menambah konflik.

Namun, kinerja yang dilakukan lembaga ini masih sebatas memberantas, belum bisa melakukan pencegahan secara maksimal. Sehingga masih banyak para koruptor yang belum disentuhnya. Survei membuktikan bahwa hanya sebagian kecil para mantan pejabat atau pejabat aktif yang terjerat kasus korupsi, baik masih dalam tahap tersangka maupun sudah terdakwa. Hal ini sangat wajar, karena para pejabat juga perlu mengembalikan uang modal kampanyenya saat pemilu. Untuk itu, pembatasan maksimal dana kampanye sangat cocok jika diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi ,selain itu pengoptimalan fungsi partai politik juga sangat berperan.

#### **Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan**

Modal untuk menjadi pejabat sangat besar, karena sebagian besar menggunakan politik uang, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah presentase modal kampanye, yaitu lebih besar modalnya. Akhirnya, setelah menjadi pejabat para pejabat terpilih berlomba lomba untuk mengembalikan modal, dan karena gaji bulanan tidak seimbang dengan jumlah yang harus dipenuhi, maka jalan pintas yang ditempuhnya, yaitu korupsi.

Isu politik uang ini juga diibaratkan seperti ‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin di tengah keramaian. Baunya merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk menunjuk orang yang membuang angin tersebut.

Selain itu,berbagai masalah timbul karena adanya penyimpangan otoritas kekuasaan, termasuk faktor kepentingan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi memang sudah sewajarnya mempunyai iklim politik yang kuat. Akan tetapi masih banyak penyimpangan otoritas politik di Indonesia. Apalagi sekarang memang sedang musim politik. Menyongsong beberapa agenda pemilu kedepan di Indonesia, mulai dari Pilkada, Pilgub hingga Pilpres. Media secara intens menayangkan berita, dialog, bahkan kampanye politik tanpa adanya regulasi yang jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa interest untuk menang dari sebuah golongan atau partai politik semakin besar. Sistem kampanye politik seperti ini memicu banyak penyimpangan politik contohnya melakukan konspirasi dan money politics. Melihat hal ini perlu adanya sebuah batasan agar tujuan pelaku politik tercapai sesuai kaidahnya.

Meminjam istilah Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama tidak golongannya saja. Tentunya harapan besar tersemat bagi para calon pemimpin negeri ini, maraknya kasus korupsi dan nepotisme yang membuat gerah masyarakat tidak bisa lepas dari penyimpangan otoritas sebuah golongan maupun partai politik.

Kasus korupsi impor daging sapi yang sarat akan konspirasi politik serta proyek Hambalang yang tidak segera tuntas adalah buktinya. Membicarakan tentang politik adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi setiap kebijakan dari pemerintah. Seperti kita ketahui banyak pejabat pemerintah merangkap pengurus partai politik. Sehingga kebijakan dari pemerintah rawan terkontaminasi kepentingan pribadi suatu partai politik. Pada akhirnya segala sesuatu tentang politik adalah tidak lagi berorientasi menang dan kalah, akan tetapi berorientasi benar dan salah. Sehingga perlu adanya reorientasi kembali mengenai tujuan serta fungsi partai politik yang benar untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.

Dari gambaran di atas terlihat adanya degradasi moral para pejabat yang berujung pada tindakan korupsi yang digunakan sebagai jalan pintas untuk mengembalikan modal kampanye saat pemilu. Dengan demikian, pembatasan dana kampanye sangat strategis untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut. Sebab, mereka tidak terbebani dengan pengembalian modal yang besar.

### **Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masing**

#### *Pemerintah*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagai lembaga independen yang selalu menindak para pejabat yang terlibat tindakan korupsi. Lembaga ini dipilih karena memang pada dasarnya lembaga ini dibuat untuk menghilangkan korupsi. Selain itu, lembaga ini merupakan lembaga yang independen sehingga sangat sedikit adanya campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan tertentu. Dengan demikian, lembaga ini sangat tepat jika dipilih untuk membantu menjalankan gagasan ini.

#### *Komisi Pemilihan Umum (KPU)*

KPU ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kesuksesannya pemilihan umum, baik dalam hal menentukan permainan dalam pemilihan umum maupun hal lainnya, sehingga perannya sangat membantu dalam merealisasikan gagasan ini.

#### *Pengawas Independen*

Pengawas independen ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, khususnya dalam hal menerapkan gagasan ini, yaitu mengawasi arus keuangan kampanye setiap calon yang telah disetujui atau ditetapkan oleh KPU jumlah maksimalnya. Team ini nantinya akan menerima laporan dari masing-masing calon atas arus keuangan yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan, yaitu menghabiskan dana untuk kampanye melebihi jumlah maksimal (jumlah yang ditetapkan KPU).

### **Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai**

Melihat situasi seperti ini, timbul berbagai penyimpangan dari fungsi partai parpol. Hasil survei tersebut menyebabkan pola pikir seorang calon harus mengeluarkan 'modal promosi' banyak. Padahal, gaji murninya selama masa jabatan belum bisa digunakan untuk mengembalikan modal. Misalnya kita asumsikan seorang bupati gaji pokoknya 6 juta/bulan dan tunjangan 9 juta/bulan, sedangkan modal kampanyenya 1 milyar dengan masa jabatan 4 tahun (48 bulan). Jumlah total yang diterima selama

menjabat sebagai bupati adalah 720 juta. Padahal modalnya 1 milyar, sehingga hal ini rawan untuk mencari jalan pintas, yaitu korupsi. Sebab, jumlah itu masih belum seimbang dengan jumlah modal yang dikeluarkan saat kampanye dan jumlah tersebut dipotong keperluan rumah tangga yang 'tidak terduga' lainnya. Sewajarnya pendanaan parpol ditata kembali.

Pertama, bantuan APBN dinaikkan. Berapa besar bantuan negara disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional parpol dan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan parpol. Dana dikucurkan setelah pemerintah melakukan verifikasi atas laporan pengeluaran yang diberikan parpol.

Karena dana APBN dinaikkan, parpol harus lebih akuntabel. Setiap tahun ada laporan keuangan yang sudah diaudit. Penerimaan dan pengeluaran harus jelas. Parpol yang melanggar diberikan sanksi tegas, mulai dari denda hingga larangan mengikuti pemilu pada periode berikut.

Kedua, biaya kampanye diturunkan dengan berbagai cara. Misalnya, setiap parpol boleh menggunakan ruangan, gedung, dan stadion milik negara. Setiap parpol mempunyai hak yang sama untuk menggunakan media massa milik negara seperti TVRI dan RRI. Ada batas tertinggi pengeluaran kampanye.

Ini semua solusi konkret yang bisa membatasi ruang gerak parpol untuk mencuri uang rakyat dengan berbagai cara. Peran parpol sangat penting karena lembaga inilah yang merekrut calon legislatif, calon pimpinan eksekutif dari bupati hingga presiden. Parpol lewat anggotanya di parlemen memilih pimpinan KPK, ketua MA, ketua MK, Kapolri, panglima TNI, gubernur dan para deputy gubernur BI, dan banyak lagi. Parpol lewat anggotanya di DPR memiliki hak budget, hak legislasi, dan pengawasan. Parpol lewat anggotanya di parlemen berhak mengubah UUD.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa akar dari terjadinya korupsi salah satunya adalah terlalu banyaknya modal dalam promosi saat pemilu juga kurangnya pengoptimalan fungsi partai politik. Untuk itu, pembatasan jumlah dana maksimal untuk kampanye merupakan salah satu solusi tepat dan cerdas dalam mencegah terjadinya korupsi, selain pengoptimalan fungsi partai politik di negeri ini. Adapun mekanismenya sebagai berikut: mewajibkan pengoptimalan fungsi partai yaitu, semua partai harus menjalankan semua fungsi partai yang diawasi oleh pengawas independen dan KPK, KPU juga harus membatasi dana kampanye partai, serta jika ada indikasi kecurangan maka KPK dapat langsung menindak lanjuti.

## **KESIMPULAN**

### **Gagasan yang diajukan**

Gagasan yang diajukan penulis adalah "Pencegahan Korupsi Melalui Pengoptimalan Fungsi Partai Politik Dan Pembatasan Dana Kampanye guna Menciptakan Pemerintah yang Bersih". Hal ini bisa dianalogkan, misalnya kita asumsikan seorang bupati gaji pokoknya 6 juta/bulan dan tunjangan 9 juta/bulan, sedangkan modal kampanyenya 1 milyar dengan masa jabatan 4 tahun (48 bulan). Jumlah total yang diterima selama menjabat sebagai bupati adalah 720 juta. Padahal modalnya 1 milyar, sehingga hal ini rawan untuk mencari jalan pintas yaitu korupsi. Sebab, jumlah itu masih belum dipotong keperluan rumah tangga yang 'tidak terduga' lainnya.

Dari segi partai politik penyelewengan fungsi partai politik sering terjadi yang dipergunakan untuk memuluskan aksi korupsi. Untuk itu, gagasan ini sangat tepat jika diimplementasikan di negeri ini.

### **Teknik implementasi yang akan dilakukan**

Adapun mekanisme untuk mengimplementasikan gagasan ini mewajibkan pengoptimalan fungsi partai yaitu, semua partai harus menjalankan semua fungsi partai sebagai berikut :

Fungsi disini diartikan sebagai apa yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh partai politik dalam rangka menyalurkan aspirasi, yaitu:

- 1). Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu sebagai media atau perantara antara rakyat dengan pemerintah. Isi dan Program Partai adalah hasil dari mendengarkan “ masyarakat “, menggabungkan serta dirumuskan, sehingga mencerminkan inti dari aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan umum. Pelaksanaan fungsi ini merupakan titik tolak terwakili atau tidaknya kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- 2). Sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam proses sosialisasi ,partai politik berfungsi dalam menyebarkan, menerangkan serta mengajak masyarakat menghayati norma-norma dan nilai-nilai politik. Sosialisasi diartikan sebagai proses dimana seseorang atau kelompok orang mengenal, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Proses ini merupakan permulaan orientasi ke dalam masalah-masalah politik. Melalui kegiatan ini partai politik ikut membina serta memantapkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kegoyahan atau keraguan terhadap norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat dapat menumbuhkan sikap “ anomie” ( ketidak pastian nilai ) di masyarakat. Masa ini sering ditemui karena nilai-nilai lama mulai mengabur sedangkan nilai-nilai baru belum mantap di masyarakat. Sosialisasi politik dapat dilakukan oleh partai politik dengan menerangkan hak dan kewajiban warga negara seperti pentingnya ikut pemilu, menyelenggarakan kursus-kursus kader, latihan berorganisasi dsb.
- 3). Sebagai sarana rekrutmen politik. Pelaksanaan fungsi dinyatakan dalam bentuk usaha dari partai politik untuk mengambil atau menarik orang-orang yang berbakat dalam politik untuk menjadi kader-kader politik. Usaha rekrutmen ini biasanya berkaitan erat dengan dengan sosialisasi yang dilakukan partai politik dan disamping itu juga berhubungan erat dengan membangkitkan partisipasi politik. Kader-kader politik terus dibina untuk menjadi penerus nilai-nilai politik, sehingga ada kontinuitas dalam mewariskan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya melalui “ rekrutmen” dan pembinaan. Rekrutmen juga dapat mengurangi atau menghilangkan alienasi ( ketidak berdayaan atau perasaan keterasingan dari lingkungan ) di kalangan generasi muda.
- 4). Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat. Dalam masyarakat adanya perbedaan, persaingan bahkan konflik dalam batas-batas tertentu dianggap wajar. Dalam hal demikian partai politik berperan untuk mengatur atau menengahi konflik yang terjadi. Cara partai mengatur konflik di masyarakat adalah dengan membuat aturan permainan atau mendukung aturan permainan yang sudah ada dalam masyarakat.

Partai politik yang menjalankan fungsi parpol, diawasi oleh pengawas independent. Pengawas independen ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, khususnya

dalam hal menerapkan gagasan ini, yaitu mengawasi arus keuangan kampanye setiap calon yang telah disetujui atau ditetapkan oleh KPU jumlah maksimalnya.

Team ini nantinya akan menerima laporan dari masing-masing calon atas arus keuangan yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan, yaitu menghabiskan dana untuk kampanye melebihi jumlah maksimal (jumlah yang ditetapkan KPU), sehingga berguna menutup semua saluran korupsi.

Pengawasan juga dilakukan, KPK sebagai lembaga independen yang selalu menindak para pejabat yang terlibat tindakan korupsi. Lembaga ini dipilih karena memang pada dasarnya lembaga ini dibuat untuk menghilangkan korupsi. Selain itu, lembaga ini merupakan lembaga yang independen sehingga sangat sedikit adanya campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan tertentu. Dengan demikian, lembaga ini sangat tepat jika dipilih untuk membantu menjalankan gagasan ini.

Begitu pula KPU juga ikut mengawasi, KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kesuksesannya pemilihan umum, baik dalam hal menentukan permainan dalam pemilihan umum maupun hal lainnya, sehingga perannya sangat membantu dalam merealisasikan gagasan ini, serta dalam membatasi dana kampanye partai, dan jika ada indikasi kecurangan maka KPK dapat langsung menindak lanjuti.

### **Prediksi hasil yang akan diperoleh**

Partai politik akan lebih mementingkan kepentingan rakyat, dan mengutamakan pemenuhan fungsi partai. Para pejabat yang sebelumnya mengutamakan tahta, dan jabatan di negeri ini yang menjadikan jalan pintas untuk mencapainya, seperti dengan menggunakan uang untuk mencapainya (*money politics*), bahkan untuk menjadi kepala desa rela untuk menghabiskan ratusan juta. Akibatnya, jabatan ini seolah seperti halnya “pabrik” orientasinya pada keuntungan, untuk mengembalikan modal.

Dengan demikian, gagasan ini dinilai memiliki perkembangan yang sangat bagus untuk mengatasi korupsi di negeri ini, karena hal ini tidak dapat memberantas tetapi mencegah terjadinya korupsi. Artinya, sebelum terjadi korupsi sudah dilindungi terlebih dulu. Akhirnya, gagasan ini dapat dijadikan acuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih.

## DAFTAR PUSTAKA

Haman, A. 2009. Lanjutkan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.  
<http://politikana.com/baca/2009/11/03/lanjutkan-pemberantasan-korupsi-diindonesia.html> [10 Januari 2010]  
<http://9triliun.com/artikel/874/fungsi-partai-politik.html>

Ubaidillah, A. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press

Hamzah, H. 2009. Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia.  
<http://belanegarari.wordpress.com/2009/11/05/membongkar-jejak-sejarahbudaya-korupsi-di-indonesia/> [10 Januari 2010]

Maheka, A. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK

Rifai, A, dkk. 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia

## Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

### A. Identitas Diri

#### 1. Ketua Pelaksana

|   |                              |                                                                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar ) | Septiana Ika Wardani                                                             |
| 2 | Jenis Kelamin                | Perempuan                                                                        |
| 3 | Program Studi                | PPKn S1                                                                          |
| 4 | NIM                          | 3301413059                                                                       |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir     | Blora, 24 September 1994                                                         |
| 6 | E-mail                       | <a href="mailto:septiana_ikawardani@yahoo.com">septiana_ikawardani@yahoo.com</a> |
| 7 | Nomor Telepon/HP             | 085641703677                                                                     |

#### 2. Anggota 1

|   |                              |                                                                    |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar ) | Dian Triyani Mahfirotik                                            |
| 2 | Jenis Kelamin                | Perempuan                                                          |
| 3 | Program Studi                | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan                           |
| 4 | NIM                          | 3301413013                                                         |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir     | Banjarnegara, 05 Februari 1996                                     |
| 6 | E-mail                       | <a href="mailto:triyandian@yahoo.co.id">triyandian@yahoo.co.id</a> |
| 7 | Nomor Telepon/HP             | 085713519592                                                       |

#### 3. Anggota 2

|   |                              |                                                                    |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar ) | Nida Haryati                                                       |
| 2 | Jenis Kelamin                | Perempuan                                                          |
| 3 | Program Studi                | Akuntansi S1                                                       |
| 4 | NIM                          | 7211412041                                                         |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir     | Bantul, 11 Juli 1994                                               |
| 6 | E-mail                       | <a href="mailto:Nidha_lovers@yahoo.com">Nidha_lovers@yahoo.com</a> |
| 7 | Nomor Telepon/HP             | 08562536754                                                        |

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Ketua Pelaksana

|                   | SD           | SMP                 | SMA                 |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Nama Institusi    | SDN 2 PILANG | SMPN 4 Randublatung | SMAN 1 Randublatung |
| Jurusan           | -            | -                   | IPA                 |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007    | 2007-2010           | 2010-2013           |

#### 2. Anggota 1

|                   | SD             | SMP          | SMA          |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| Nama Institusi    | SDN 01 Wanadri | SMP 3 Bawang | SMA 1 Bawang |
| Jurusan           | -              | -            | IPS          |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007      | 2007-20010   | 2010-2013    |

### 3. Anggota 2

|                   | SD        | SMP                     | SMA           |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| Nama Institusi    | SDN Belan | SMPN 2<br>Bambanglipuro | SMKN 1 Bantul |
| Jurusan           | -         | -                       |               |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009               | 2009-2012     |

### C. Pemakalah Seminar Ilmiah( *Oral Presentation* )

#### 1. Ketua Pelaksana

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|--------------------------------|----------------------|------------------|
| 1  | -                              | -                    | -                |
| 2  | -                              | -                    | -                |
| 3  | -                              | -                    | -                |

#### 2. Anggota 1

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|--------------------------------|----------------------|------------------|
| 1  | -                              | -                    | -                |
| 2  | -                              | -                    | -                |
| 3  | -                              | -                    | -                |

#### 3. Anggota 2

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|--------------------------------|----------------------|------------------|
| 1  | -                              | -                    | -                |
| 2  | -                              | -                    | -                |
| 3  | -                              | -                    | -                |

### D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

#### 1. Ketua Pelaksana

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | -                 | -                             | -     |

#### 2. Anggota 1

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | -                 | -                             | -     |

#### 3. Anggota 2

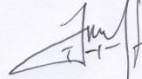
| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|----|-------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | -                 | -                             | -     |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT.

Semarang , Maret 2014

Ketua



Septiana Ika Wardani  
Nim 3301413059

**Lampiran 2. Susunan Organisasi Kegiatan dan Pembagian Tugas**

| No | Nama /Nim                             | Program Studi | Bidang Ilmu  | Alokasi Waktu    | Uraian Tugas                                                         |
|----|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Septiana Ika Wardani/<br>3301413059   | PKn           | PPKn S1      | 6 jam/<br>minggu | Penanggung jawab dan Ketua gagasan tertulis                          |
| 2  | Dian Triyani<br>Mahfirotik/3301413013 | PKn           | PPKn S1      | 6 jam/<br>minggu | Melakukan pengamatan penerapan gagasan tertulis                      |
| 3  | Nida<br>Haryati/7211412041            | Akuntansi     | Akuntansi S1 | 6 jam/<br>minggu | Membuat laporan hasil pengamatan serta menyimpulkan Gagasan tertulis |

**Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**

Kantor: Gedung H Lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001

Website: [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id) - E-mail: [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septiana Ika Wardani  
NIM : 3301413059  
Program Studi : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan, S1  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa usulan (**Isi sesuai dengan bidang PKM**) saya dengan judul **"Pencegahan Korupsi melalui Pengoptimalan Fungsi Partai Politik dan Pembatasan Dana Kampanye"**.

Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Maret 2014

Mengetahui,

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan



(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd)

NIP. 196205081988031002

Yang menyatakan,



(Septiana Ika Wardani)

NIM. 3301413059

